

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik selalu dituntut agar memiliki kinerja yang ditujukan pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk tanggap terhadap lingkungan disekitarnya, dengan cara memberikan upaya pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, serta adanya pembagian tugas yang baik pada suatu struktur organisasi pemerintahan. Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparat atau manajerial organisasi tersebut (Nengsy 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapan belanja daerah (APBD) sendiri yang sesuai kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran pendapatan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar

diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan pendapatan asli daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu disisi manajemen pengeluaran daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan lebih efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau *Financing Reform*.

Berkaitan dengan kinerja, maka salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kinerja pemerintah daerah pada organisasi sektor publik, dapat dilihat dari proses perencanaan, karena suatu perencanaan dapat menentukan keberhasilan suatu program kegiatan (Baihaqi 2014). Namun, tidak jauh berbeda dengan Bahgia (2020) dan Wiwaha I Gede (2018) bahwa kinerja tidak dapat dilihat dari input atau perencanaan program saja, tetapi lebih ditekankan kepada jalannya proses, output, manfaat, dan *outcome* dari program kegiatan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut Firda, Yesi, dan Novita (2017) pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagai suatu alat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai dengan sasaran dan tujuanyang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Kinerja pemerintah Daerah menurut Mashun (2014) yaitu kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja bagian dari

produktivitas berasal dari produktif yang artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali, sehingga produktivitas dapat dikatakan suatu proses kegiatan yang terstruktur guna menggalipotensi yang ada dalam sebuah komoditi.

Berkaitan dengan kinerja menurut Arfah, Eka dan Widia (2020) kinerja pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan desa dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana desa untuk kepentingan masyarakat. Arifani (2018) mengemukakan bahwa kinerja pemerintah daerah adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok, dengan melalui usaha yang konsisten dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif. Rulyanti, Sularso, dan Syekti (2018) untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yaitu salah satunya dengan melakukan pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak jauh berbeda dengan penelitian menurut Nyoman, Yunita dan Putu (2019) kinerja pemerintah desa yaitu untuk meningkatkan kinerja secara optimal serta mampu menciptakan tujuan masyarakat desa yang sejahtera serta mengedepankan akuntabilitas dan peningkatan pelayanan publik. Asmawati, Prayitno dan Ahmad (2018) kinerja pemerintah daerah yang baik dapat ditunjukkan dengan indikator akuntabilitas dan transparansi.

Badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD) merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada di Kabupaten Gorontalo melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang keuangan dan aset daerah sebagai

tugas pokok. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala badan pengelolaan daerah menyusun kebijakan teknis fungsi sebagai penunjang bidang keuangan, menyelenggarakan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang bidang keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang bidang keuangan dan pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Akan tetapi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan masih terdapat beberapa kendala dalam sistem informasi yaitu kebijakan dalam pemakaian aplikasi yaitu SIMDA (Sistem Informasi Daerah) keuangan yang kurang memadai karena masalah jaringan yang terkendala sehingga dalam menginput data laporan keuangan tidak tepat pada waktunya serta keterlambatan dalam *up-date* sistem yang selalu berubah sedangkan dalam *value for money* belum sepenuhnya dilakukan pertanggung jawaban publik oleh lembaga-lembaga pada masyarakat, yang sering disebut dengan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi lembaga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara priodik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga pemerintahan Kabupaten Gorontalo untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menjalankan peraturan dituntut tidak hanya sekedar melakukan *vertical reporting* yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan akan tetapi juga melakukan horizontal

reporting yaitu pelaporan kinerja pemerintahan kabupaten kepada lembaga pemerintahan lainnya (Kabupaten Gorontalo, 2021).

Kondisi kinerja suatu organisasi terutama dalam instansi pemerintah harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu khususnya bagi pegawai yang bersangkutan untuk mengetahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu khususnya bagi pegawai yang bersangkutan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil dalam instansi pemerintah. Program kinerja pada instansi pemerintah sangat tergantung pada hasil pembenahan yang dilakukan manajemen dengan penerapan *value for money* dan sisten pengendalian internal.

Penilaian kinerja pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sangat penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pertanggungjawaban dalam instansi pemerintah agar hasil kinerja lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi, dalam meningkatkan pelayanan dan pertanggungjawaban kepala badan pengelola keuangan daerah harus meningkatkan kinerja melalui *value for money* dan sistem pengendalian internal. Karena dalam suatu kinerja organisasi sangat tergantung dari kualitas *value for money* dan sistem pengendalian internal.

Berkaitan dengan kinerja ada terdapat tiga faktor penting, yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, serta peran dan tingkat motivasi seorang pekerja semakin tinggi, akan semakin besar kinerja pegawai yang bersangkutan. Hal ini

juga sinkron dengan hasil penelitian oleh Setiawan dan Gusnita (2016) yang menyatakan faktor motivasi kinerja berpengaruh terhadap kinerja.

Menurut Amins (2017) mengatakan bahwa kinerja pemerintah daerah adalah sebagai ekspresi potensi berupa perilaku atau cara seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas sehingga menghasilkan suatu produk yang merupakan wujud dari semua tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang diberikan kepadanya. Menurut Azwir dan Ranti (2016) kinerja pemerintah adalah sebagai perilaku seseorang yang membuahkan hasil kerja tertentu setelah memenuhi sejumlah persyaratan.

Berkaitan dengan pengaruh penerapan *value for money* dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah masih menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Azlina (2014) yaitu *value for money* dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan adalah terbukti. Hasil penelitian yang dilakukan Nova dan Vidya (2017) menyatakan bahwa *value for money* dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. menyimpulkan bahwa *value for money* dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Azwir & Ranti (2016) *value for money* dan sistem pengendalian internal tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hubungan antara *value for money* dan sistem pengendalian internal dengan kinerja pemerintah daerah merupakan bidang penelitian yang banyak mengalami perdebatan. Perdebatan tersebut menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian kembali. Sari dan Indriani (2018) menunjukkan bahwa *value for money* dan sistem pengendalian internal dianggap tidak cocok untuk mengukur kinerja pemerintah daerah karena kecenderungan menggunakan pendekatan tradisional.

Berdasarkan latar belakang maka dalam penelitian ini diambil untuk melakukan penelitian kembali dengan objek yang berbeda yaitu pada pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan *Value For Money* Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Dinas sosial Dan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo).**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan masalah penelitian yakni:

1. Apakah *value for money* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.?
3. Apakah *value for money* dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat penerapan *value for money* terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat penerapan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui penerapan *value for money* dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikir dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya tentang kinerja pemerintah daerah
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang penerapan *value vor money* dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Manfaat praktis

Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya.